

**SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENYELENGARAAN  
KAMTIBMAS DI KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN  
BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

Joko Pramono, Wulan Kinasih  
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta  
[kinasihkudo@gmail.com](mailto:kinasihkudo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Penyelenggaraan kamtibmas merupakan wujud dari governance. Governance dapat berjalan dengan baik dengan adanya sinergitas antar stakeholder. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta. Sinergitas menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan antar stakeholder sehingga tujuan tercapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil data kemudian dianalisis menggunakan analisis model interaktif Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaan kamtibmas di kelurahan Gilingan. Sinergitas inside stakeholder dilihat dari segi komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sinergitas outside stakeholder kurang terjalin dengan baik.

Kata Kunci: Sinergitas, Stakeholder, Kamtibmas

**ABSTRACT**

Security is an obligation that must be fulfilled by every country towards its citizens. Organizing kamtibmas is a manifestation of governance. Governance can work well with the synergy between stakeholders. This study aims to describe the synergy between stakeholders in the implementation of the Kamtibmas in the Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Synergy is one of the important factors in relations between stakeholders so that goals are achieved.

The method used in this study is descriptive qualitative. Data obtained by observation, interviews and documentation. The results of the data were then analyzed using the analysis of the interactive models of Miles and Hubberman.

The results of the study showed that there was a good synergy in the implementation of community service in the Gilingan. Synergy inside the stakeholder in terms of communication and coordination is well established. The outside stakeholder synergy is not well established.

Keywords: Synergy, Stakeholders, Kamtibmas

## PENDAHULUAN

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam UUD 1945. Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Berdasarkan uraian

tersebut, pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI tetapi juga menjadi tanggung jawab warga Negara atau yang disebut dengan Sishankamrata.

Peran serta masyarakat dalam bentuk Satlinmas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No.84 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 3 kemudian disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan

amanat tersebut, linmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di daerah.

Keterlibatan Satlinmas, TNI dan Polri dalam Sishankamrata menunjukkan adanya implementasi konsep *governance* yang memerlukan keterlibatan dari semua stakeholders. *Governance* didefinisikan oleh Kooiman (2007) sebagai sebuah konsepsi tentang interaksi dalam memerintah, di mana interaksi itu sendiri merupakan hubungan saling menguntungkan antara dua atau lebih aktor atau entitas. Dalam Sishankamrata terdapat interaksi yang saling menguntungkan antara berbagai pihak yaitu TNI, Polri dan Satlinmas selaku masyarakat. Interaksi ini saling mengisi satu sama lain dalam menciptakan tujuan yang sama. Untuk itulah perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*). Dengan demikian sinergitas antar stakeholder

dalam penyelenggaraan kamtibmas merupakan salah satu pendukung keberhasilan.

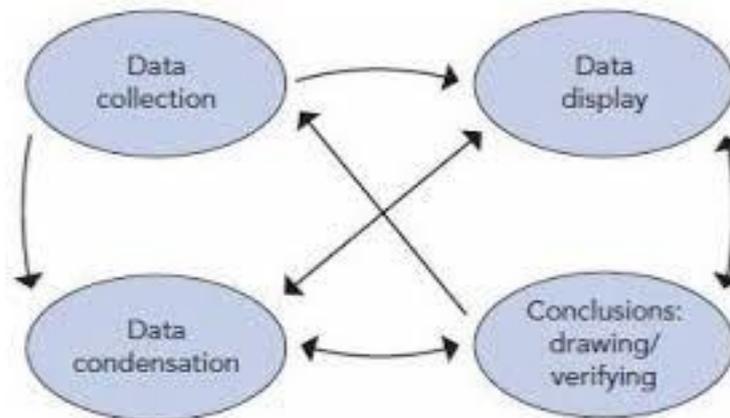
Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas perlu dibangun sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antar stakeholder. Sinergitas merupakan paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama antar stakeholder (Najianti dalam Rahmawati et al. 2014). Stakeholders dalam penyelenggaraan kamtibmas meliputi Satlinmas, TNI dan Polri. TNI pada tataran kelurahan kemudian diwakili oleh Babinsa dan Polri pada tingkat kelurahan oleh Babinkamtibmas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mendeskripsikan sinergitas stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara

dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model analisis interaktif Miles & Huberman. Langkah-langkah

analisis data model interaktif Miles dan Huberman di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif**  
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

## PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Satlinmas merupakan wujud dari *governance*. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah public (Sumarto, 2003:2). Sedarmayanti (2009:280) juga mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Negara/pemerintahan:

konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan

kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal

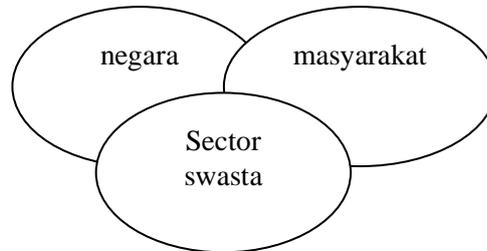
c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang

berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Hubungan ketiga actor ini saling berkesinambungan dan berkaitan

antara satu dengan yang lain.

Gambaran tentang hubungan ketika actor ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1: Hubungan Antar Sektor dalam *Governance*

Sumber: Sedarmayanti (2009:280)

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Konsep *governance* ini menjadi salah satu solusi dalam menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Interaksi antara ketiga actor akan mendorong terciptanya *good governance* yang mampu mendorong

dan mengisi satu dengan yang lainnya. Basuki dan Shofwan (2006,13) mengartikan *Good Governance* sebagai upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. *Good Governance* akan tercipta jika terjalin hubungan yang sinergis antar seluruh *stakeholders* yang ada di dalamnya. *Stakeholders* menurut Freeman (1984,2) merupakan sebuah kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Adanya interaksi antar ketiga *stakeholders* diperlukan adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan tersebut.

Sinergi antar actor harus dilakukan dalam rangka mengefektifkan mencapai tujuan. Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Penyelenggaraan Kamtibmas adalah bentuk sinergitas yang dilakukan oleh beberapa stakeholder. Jones dalam Selviyanna (2010) membagi *stakeholder* kedalam dua kategori, yaitu:

a. *Inside Stakeholder*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya organisasi secara berada didalam organisasi

b. *Outside Stakeholder*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik organisasi, tetapi memiliki kepentingan terhadap organisasi dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi

Inside Stakeholder dalam penelitian ini berada dalam organisasi Satlinmas yang meliputi lurah, Danton satlinmas dan anggota satlinmas. *Outside Stakeholder* dalam penelitian meliputi aktor diluar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu masyarakat, Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan BPBD.

Sinergitas inside stakeholder berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terbangunnya komunikasi yang baik antara lurah, danton satlinmas dan anggota satinmas. Komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut (sofyandi dan Garniwa, 2007). Karena kantor satlinmas dan

kelurahan menjadi satu lokasi hal ini menjadikan komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi dilakukan secara formal maupun informal.

Komunikasi secara informal dilakukan hampir dalam keseharian. Komunikasi ini dilakukan untuk membahas permasalahan permasalahan kecil atau sekedar berbagi informasi dengan sesama anggota satlinmas antara danton satlinmas dengan anggota maupun dengan lurah setempat. Komunikasi antar anggota memang terlihat lebih intensif dibandingkan dengan komunikasi dengan lurah. Komunikasi paling intens terlihat antar sesama anggota satlinmas. Walaupun mereka memiliki tempat patroli yang berbeda, namun mereka masih sering bertemu untuk berbagi informasi. Komunikasi terlihat semakin intensif ketika ada acara atau kegiatan tertentu.

Komunikasi antara danton satlinmas, anggota satlinmas dan lurah juga terjaga dengan baik. Lurah selaku pengarah dan pengawas juga selalu membangun komunikasi dengan danton maupun anggota satlinmas. Arah informal memang lebih sering terjadi dibanding formal.

Komunikasi antara danton dengan anggota juga lebih sering terjadi secara informal. Komunikasi secara kekeluargaan menjadi lebih diunggulkan.

Komunikasi juga dilakukan secara formal. Komunikasi formal dilakukan dengan rapat, koordinasi, dan apel rutin. Komunikasi ini dilakukan pada waktu waktu tertentu saja. Komunikasi yang paling sering dilakukan adalah apel. Komunikasi ini dilakukan antara danton dengan anggota satlinmas. Komunikasi ini lebih berlangsung satu arah. Komunikasi melalui rapat dan koordinasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Komunikasi ini berlangsung dengan dua arah walaupun tidak dilakukan secara intensif.

Komunikasi *outside Stakeholder* dalam penelitian meliputi aktor diluar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu masyarakat, Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan BPBD. Komunikasi dengan *outside stakeholder* paling intensif terlihat antara satlinmas dengan masyarakat. Hal ini karena satlinmas berhubungan langsung

dengan masyarakat setempat. Masyarakat dan satlinmas bebas menjalin komunikasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memang sangat diperlukan sebagai wujud kedekatan satlinmas dengan masyarakat dan sebagai sarana menggali informasi dan aspirasi. Komunikasi intensif selanjutnya dilakukan dengan Satpol PP. Secara structural, memang satlinmas berada dibawah koordinasi satpol PP. Komunikasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada danton satlinmas.

Satlinmas memiliki tugas sebagai mitra dari babinsa, babinkamtibmas dan BPBD sehingga perlu komunikasi yang jelas dalam membantu pelaksanaan tugas. Komunikasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, terjalin dengan cukup baik. Komunikasi antara satlinmas dengan babinsa dan babinkamtibmas dilakukan dengan cara informal maupun formal. Kerjasama antara satlinmas dengan babinsa dan babinkamtibmas untuk saling berbagi informasi dan membantu satu sama lain. Komunikasi antara satlinmas dengan BPBD terjalin pada saat-saat

tertentu. Komunikasi dilakukan dalam bentuk berbagi informasi tentang permasalahan daerah rawan bencana ataupun bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (Silalahi, 2011). Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005). Moekijat (1994: menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

#### 1) Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

#### 2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

#### 3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung

pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

9) Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat

Koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kamtibmas di kelurahan Gilingan sudah baik.

Koordinasi Inside Stakeholder dalam penelitian ini berarti adalah koordinasi yang berada dalam organisasi Satlinmas yang meliputi lurah, Danton satlinmas dan anggota satlinmas. Koordinasi ini berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan dengan mudah melalui hubungan pribadi langsung. Koordinasi lebih mudah dilakukan dengan melibatkan lurah, danton dan anggota satlinmas,. Koordinasi selalu dilakukan mulai dari tahap perencanaan sebuah kegiatan atau program sampai dengan evaluasi. Koordinasi ini dilakukan secara formal maupun informal secara pribadi.

Koordinasi inside stakeholder dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Koordinasi ini dimudahkan karena organisasi satlinmas yang sederhana. Komunikasi juga berjalan dengan sangat efektif karena lebih didasarkan dengan semangat kekeluargaan. Wewenang dalam keorganisasian satlinmas juga cukup

jasas. Kejelasan wewenang inididak hanya mengurangi pertentangan di anggota satlinmas, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan bersama yaitu menciptakan lingkungan Gilingan yang aman, nyaman dan tertib. Proses koordinasi berada di bawah pemimpin yang bertanggungjawab baik danton maupun lurah gilingan.

Koordinasi outside stakeholder meliputi aktor diluar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Aktor ini meliputi masyarakat, Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan BPBD. Koordinasi antara satlinmas dengan Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan BPBD tidak seintensif yang terjadi pada inside stakeholder. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu. Jadi bukan hanya didasarkan pada hubungan langsung. Tidak semua kebijakan dikoordinasikan mulai dari perencanaan. Koordinasi lebih dilakukan pada pelaksanaan tugas bukan pada tahap perencanaan.

Koordinasi ini dilakukan secara formal antar hubungan organisasi.

Koordinasi outside stakeholder dilakukan hanya pada kegiatan tertentu. Koordinasi ini dikendala dengan adanya sekat-sekat organisasi dengan tupoksi masing-masing. Koordinasi dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang organisasi masing masing. Koordinasi antar lembaga dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan bersama yaitu menciptakan lingkungan Gilingan yang aman, nyaman dan tertib.

Berdasarkan paparan diatas, terjadi sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaan kamtibmas di kelurahan Gilingan. Sinergitas inside stkaholder dilihat dari segi komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sinergitas outside stakeholder kurang terjalin dengan baik. berjalan Sinergitas pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama (Pamudji, 1985:12). Sehingga senergitas yang baik akan memudahkan dalam

tercapainya tujuan terciptanya lingkungan Gilingan yang aman, nyaman dan tenteram.

## KESIMPULAN

Sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaan kamtibmas di kelurahan Gilingan. Sinergitas inside stkaholder dilihat dari segi komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Inside stkaholder terdiri dari lurah, danton satlinmas dan anggota satlinmas. Terjalannya sinergitas yang baik dalam inside stakeholders ini disebabkan oleh komunitas yang masih dalam ruang lingkup kecil dan struktur organisasi yang sederhana. Sinergitas outside stakeholder kurang terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya sekat sekat organisasi sehingga koordinasi dan komunikasi terjalin secara lebih formal

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. SPOD FE-UB: Malang
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Blackwell Publishing: Boston
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung
- Kooiman, Jan. 2007. *Governing as Governance*. John Wiley & Sons, Ltd
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). Jurnal Ketransmigrasian, 28 (2) Desember, pp.113-124
- Pamudji, S. .1985. *Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*. Bina Aksara: Jakarta
- Rahmawati, Triana et al. 2014. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647
- Sedarmayanti. 2003.. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandar Maju: Bandung
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama

- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyandi, Herman & Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partispasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia